

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI JARINGAN PETERNAKAN  
(SIJINAK) DALAM PENDEKATAN *E-GOVERNMENT***

**Study Kasus: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

**Kabupaten Sumbawa Tahun 2021**

*IMPLEMENTATION OF THE LIVESTOCK NETWORK INFORMATION SYSTEM  
(SIJINAK) IN THE CASE STUDY OF THE E-GOVERNMENT APPROACH: THE ANIMAL  
HUSBANDRY AND ANIMAL HEALTH OFFICE OF SUMBAWA REGENCY IN 2021*

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh :

**IMANUDDIN**  
**NIM. 217110011**

**PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI JARINGAN PETERNAKAN  
(SIJINAK) DALAM PENDEKATAN *E-GOVERNMENT*  
Study Kasus: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021**

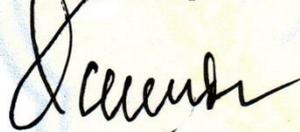
Oleh :

**IMANUDDIN**  
NIM. 217110011

Untuk memenuhi ujian siding skripsi  
Tanggal 13 Agustus 2021

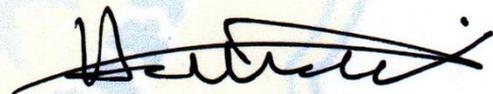
Menyetujui  
**Pembimbing**

**Pembimbing I.**



**(Drs. Mintasrihardi, M.H)**  
NID : 0830016101

**Pembimbing II**



**(M. Aprian Jailani, S.AP, M.AP)**  
NID : 0804049501

Mengetahui,

Program Studi Administrasi Publik

Ketua Program Studi



**(RAHMAD HIBAYAT, S.AP. M.AP)**  
NIDN : 0822048901

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI JARINGAN PETERNAKAN (SIJINAK) DALAM PENDEKATAN *E-GOVERNMENT* Study Kasus: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021

Oleh ;

IMANUDDIN  
NIM. 217110011

Telah dipertahankan Didepan Penguji  
Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Agustus 2021

Tim Penguji.

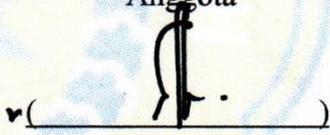
1. Drs. Mintasrihardi, M.H  
NID. 0830016101

()  
Ketua

2. M. Aprian Jailani, S.AP, M.AP  
NID. 0804049501

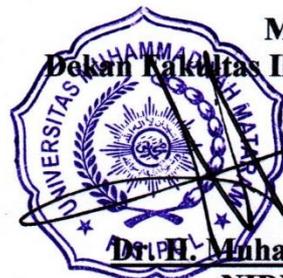
()  
Anggota

3. Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP  
NIDN. 0822048901

()  
Anggota

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik

()  
v Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP  
NIDN. 0822048901



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

()  
Dr. Ph. Muhammad Ali Ihsan, M.Si  
NIDN. 0806066801

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : IMANUDDIN

Nim : 217110011

Alamat : Jl. Sultan Salahudin Gang Manggis No. 16b, Kec. Sekerbela  
Mataram

Memang benar skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan (Sijinak) daam Pendekatan *E-Government* (Study Kasus : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021” ini benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi di tempat manapun.

Skripsi ini murni hasil gagasan, rumusan dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang acuan sebagai sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 13 Agustus 2021

Penulis



**IMANUDDIN**  
NIM. 217110011



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMANUDDIN.....  
NIM : 217110011.....  
Tempat/Tgl Lahir : MARENTE, 20-07-1997.....  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK.....  
Fakultas : FI.VI.POL.....  
No. Hp/Email : 085.338.628.299/Imanuddinatajot@gmail.com.....  
Judul Penelitian : -

Implementasi Sistem Informasi Jaringan Perternakan (SIJINAK).....  
Dalam Pendekatan E-Government Study kasus : Dinas Perternakan.....  
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021.....

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.** 44%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 25 AGUSTUS 2021

Penulis



IMANUDDIN.....  
NIM. 217110011.....

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.  
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMANUDDIN.....  
NIM : 217110011.....  
Tempat/Tgl Lahir : MARENTE, 20-07-1997.....  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK.....  
Fakultas : FISIPOL.....  
No. Hp/Email : 085 338 628 299 / imanuddinmaja107@gmail.com.....  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

*Implementasi Sistem Informasi Jaringan Perternakan (SITINAK).....  
Dalam Pendekatan E-Government Study kasus: Dinas Perternakan  
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021.....*

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 27 Agustus 2021

Penulis



IMANUDDIN  
NIM.217110011

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

**Karya Ilmiah Ini Aku Persembahkan Untuk Ayah dan  
Ibu Tercinta**  
(Juniadi dan Alm. Radiyah)

*“Jalani hidup untuk tidak menyerah terus berjuang karena waktu tidak akan berhenti  
untuk sesaat kejarlah mimpimu selagi ada waktu”*



## KATA PENGANTAR

Segalah Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Implementasi Sistem Informasi Jaringan Peternakan (Sijinak) daam Pendekatan E-Government (Study Kasus : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021*" Penulis menyadari dalam penyusuna skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Mardiah, S.sos, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti kepada Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Kharis, S.E., M.M sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan berbagai macam saran dan kritikan sehingga skripsi ini berjalan dengan benar.
6. Orang tua peneliti yang selalu memberikan Doa dan motivasi serta dukungan semangat bagi peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Rekan-rekan Mahasiswa, Program Studi Administrasi Publik dan semua pihak yang telah memberikan masukan dorongan serta semangat motivasi bagi peneliti.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah tulus dan ikhlas memberi doa dan dukungan hingga dapat terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa yang telah disusun dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dan pembaca pihak lain yang berkepentingan dan dapat memberi sumbangan bagi Almamater tercinta.

Mataram, 13 Agustus 2021

Penulis

**IMANUDDIN**  
**NIM. 217110011**

## ABSTRAK

### **PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI JARINGAN PETERNAKAN (SIJINAK) DALAM PENDEKATAN *E-GOVERNMENT* STUDY KASUS : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA 2021**

Oleh :

Imanuddin<sup>1</sup>, Mintasrihardi<sup>2</sup>, Muhammad Aprian jailani<sup>3</sup>  
Program Study Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) dalam pedekatan *E-Government* di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan dengan berbagai kegiatan berupa e-registrasi ternak, e-vaksinasi ternak, e-ijin pengeluaran ternak, e-pelayanan kesehatan hewan, e-RPH (rumah potong hewan), e-pasar ternak, e-bantuan ternak dan e-LAR untuk melayani masyarakat (peternak) dan untuk pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan yang belum berjalan secara optimal melalui komunikasi, sumber daya sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (peternak). Sehingga pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan dapat mendukung pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam pelayanan yang berbasis teknologi dalam mencapai pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam proses pelayanan Sistem Informasi Jaringan Peternakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, E-Governemnt, Sistem Informasi Jaringan Peternakan.

## ABSTRACT

### LIVESTOCK NETWORK INFORMATION SYSTEM (SIJINAK) IMPLEMENTATION IN AN E-GOVERNMENT APPROACH

Case Study at the Department of Animal Husbandry and Animal Health in  
Sumbawa Regency in 2021

By:

Imanuddin<sup>1</sup>, Mintasrihardi<sup>2</sup>, Muhammad Aprian jailani<sup>3</sup>  
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,  
Muhammadiyah University of Mataram

The goal of this study is to evaluate how the Livestock Network Information System (SIJINAK) was implemented in the E-Government approach at the Department of Animal Husbandry and Animal Health in Sumbawa Regency, as well as the reasons that hampered its implementation. This research is qualitative in nature. To serve the community (breeders), the Livestock Network Information System is being implemented, with various activities such as e-registration of livestock, e-vaccination of livestock, e-licensing for livestock production, e-animal health services, e-RPH (animal slaughterhouses), e-cattle market, e-livestock assistance, and e-LAR (breeders) and for the implementation of the Livestock Network Information System that has not been running optimally through communication, inadequate facilities and infrastructure resources to improve the quality of service to the community (breeders). So that the Livestock Network Information System can support the Sumbawa Regency Government's public services in technology-based services, resulting in effective and efficient public services in the Livestock Network Information System's service process at the Department of Animal Husbandry and Animal Health of Sumbawa Regency.

**Keywords:** *Policy Implementation, E-Government, Livestock Network Information System.*



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1. Tujuan.....	5
1.3.2. Manfaat.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Landasan Teori .....	12
2.2.1. Konsep Implementasi.....	12
2.2.2. Konsep Elektronik Government .....	19
2.2.3. Sistem Informasi Jaringan Peternakan.....	27
2.2.3.1. Petunjuk Pengoperasian Aplikasi SIJINAK..	29
2.3. Kerangka Berpikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39

3.3. Pemilihan Informan/Naarasumber .....	40
3.4. Sumber dan Jenis Data .....	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6. Teknik Analisa Data .....	44
3.7. Uji Validitas Data.....	46
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>49</b>
4.1. Gambaran Umum Lakosi Penelitian.....	49
4.1.1. Profil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar .....	49
4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar .....	52
4.1.3. Visi dan Misi .....	53
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	53
4.2.1. Pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar.....	53
4.2.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar.....	63
4.2.3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaa Sistem Informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) ) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.2. Kesimpulan.....	66
5.3 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Penelitian Terdahulu	7
2.	Rekapitulasi ternak Rakyat dan Pemerintah Kategori I & II Tahun 2020	62



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Tampilan awal Website SIJINAK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa	30
2.	Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa	53
3.	Kartu Ternak	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem penyelenggaraan dalam melayani masyarakat sangat penting demi mencapai pelayanan publik yang efektif dan efisien, dengan adanya perubahan dalam inovasi pelayanan publik itu sendiri. Pemerintah yang sangat memperhatikan kepentingan masyarakat dalam mendapatkan sebuah informasi publik demi mencapai pelayanan yang baik dan memuaskan pada masyarakat. Pengetahuan akan teknologi saat ini berkembang sangat baik di lingkungan pemerintahan dan kalangan masyarakat, sehingga akan hal ini mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Di lingkungan pemerintahan untuk melakukan inovasi pelayanan publik untuk masyarakat demi mendapat pelayanan yang baik, dengan adanya *Elektronik Government* (e-government) untuk perubahan pelayanan masyarakat agar mencapai kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang diikuti dengan panduan penyusunan rencana induk pengembangan *E-Government* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan tujuan *E-Government* untuk membentuk jaringan

komunikasi di antara masyarakat, swasta, dan pemerintahan lainnya untuk memperlancar intraksi, transaksi dan layanan.

Menurut Indrajit (2002:36) *E-Government* yaitu suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. Sehingga dalam proses pelayanan di pemerintah dengan perkembangan *e-government* mengakibatkan pelayanan berjalan dengan efektif dan efisien, maka setiap daerah mengubah pelayanan publik kepada masyarakatnya dengan perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya di beberapa daerah yang ada di Indonesia yaitu Kabupaten Sumbawa Besar yang menerapkan Program *Smart City* Sumbawa.

Kabupaten Sumbawa yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni salah satu daerah yang akan sumber daya alam melimpah terdiri dari beberapa yaitu sektor pertanian, peternakan dan pariwisata. Dilihat dari sektor peternakan yang ada di Sumbawa Besar, yang memiliki populasi ternak yang paling dan meningkat setiap tahunnya. Dengan seiring meningkatkan populasi ternak tersebut, pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar dalam *Smart City* mengeluarkan sebuah inovasi pelayanan kepada masyarakat (peternak) yaitu Sistem Informasi jaringan Peternakan (Sijinak), hadirnya aplikasi ini biasa perbaiki tata kelola peternakan untuk yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Kabupaten Sumbawa melakukan perubahan pelayanan demi terwujudnya pemerintah yang transparansi dan akuntabilitas dalam keterbukan informasi publik. Munculnya sebuah sistem ini, dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor.91 Tahun 2018, tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Sumbawa adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi di daerah.

Smart City Sumbawa – memantapkan pelaksanaan registrasi ternak secara elektronik, bertempat diruang Kadis Kominfotik Kabupaten Sumbawa dalam pengembangan aplikasi SIJINAK (Sistem Informasi Jaringan Peternakan) pada Jum.at 27 September 2019 yang lalu. Pada pertemuan tersebut. Sistem operasi aplikasi Sijinak masih dibedah untuk mengetahui sejauh mana progres pengembangan dari aplikasi ini karena aplikasi Sijinak yang nantinya bisa diakses oleh publik dengan penguatan sistem database “ternak” dan “pemilik ternak” yang akan dioperasikan melalui secara *online* dengan output Kartu Ternak yang sudah terhubung dengan server database peternakan (Dikutip dari *Smart City Sumbawa*, 01 Oktober 2019).

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar berharap dengan adanya Sistem Informasi Jaringan Peternakan (Sijinak) dapat mendukung Program *Smart City* Sumbawa, yang dimana terlaksananya system Sijinak dalam mengelola data ternak di Sumbawa. Dengan demikian, aplikasi Sijinak yang belum bisa di akses oleh publik sebab itu aplikasi ini memiliki

permasalahan dalam pelaksanaan karena aplikasi Sijinak ini nantinya akan membantu kegiatan peternakan dari hulu ke hilir di dalam sistem Sijinak dengan penguatan sistem database “ternak” dan “pemilik ternak” yang akan dioperasionalkan melalui system informasi jaringan peternakan, dengan melalui kartu ternak yang sudah memiliki barcode generator yang terhubung dengan server database peternakan.

Oleh karena itu, sebuah program yang baru pasti memiliki kekurangan di dalam pelaksanaannya dalam mengelola data peternakan yang ada di Kabupaten Sumbawa besar, yang dimana permasalahan itu dapat berupa sumber daya manusia yang kurang menguasai teknologi yang ada di dinas tersebut dalam mengelola sistem Sijinak itu sendiri, kerjasama antara organisasi yang mendukung dalam keamanan data ternak dan sarana prasarana berupa teknologi informasi yang kurang memadai dalam pelaksanaan system tersebut. Selain itu, permasalahan diatas tentunya partisipasi masyarakat (peternak) untuk mendukung pelaksanaan sistem Sijinak. Maka dari situ, saya mengambil judul skripsi ini ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) dalam pemanfaatan teknologi dengan pendekatan *E-Government* di dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang ingin mengkaji rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) dalam pendekatan *e-government* di dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) dalam pendekatan *e-government* di dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) dalam pendekatan *e-government* di dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa.
2. Untuk mengetahui factor penghambat dalam pelaksanaan system informasi jaringan peternakan (Sijinak) dalam pendekatan *e-government* di dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademis**

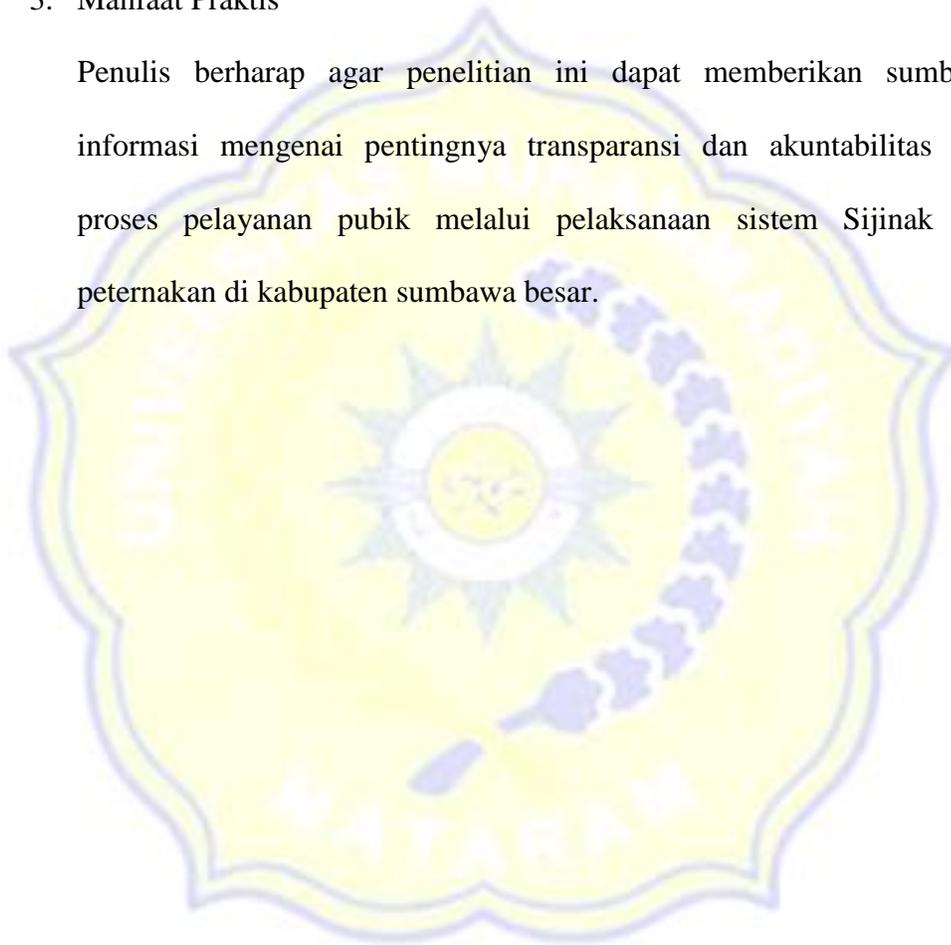
Diharapkan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan studi pada program Studi Administrasi Publik dalam meraih gelar sarjana (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam memperkaya ilmu wawasan dari konsep dan praktek perkembangan *e-government* di dalam ilmu administrasi Publik dan implementasi kebijakan social.

### 3. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik melalui pelaksanaan sistem Sijinak untuk peternakan di kabupaten sumbawa besar.



## BAB II

### KAJIAN PUSAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini saya memaparkan penelitian terdahulu secara sistematis yang tujuan untuk mendukung kelengkapan penelitian saya dalam menganalisis persoalan dan memilih konsep-konsep teori dari penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini, yang dimana penelitian saya yang mengacu pada penerapan *E-Government* sebagai pelayanan publik yang efektif dan efisien untuk masyarakat, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1. Penelitian Terdahulu**

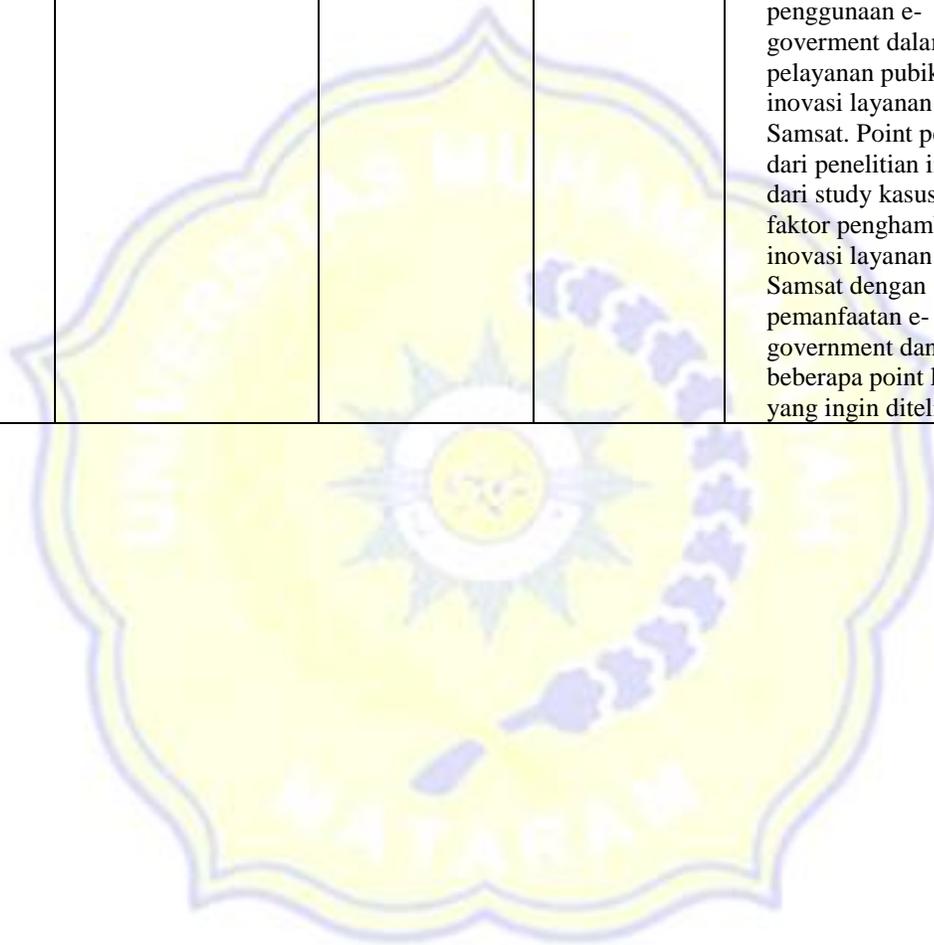
No .	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metodelogi	Hasil Penelitian
1	Wilda Maulani, 2020	Penerapan Elektronik Government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (Study kasus program E-health di Kota Surabaya).	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penelitian ini menjelaskan manfaat sebuah Program E-Health dalam penerapan E-government, yang dimana aplikasi E-Health adalah aplikasi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang dikembangkan untuk memaksimalkan pemberian pelayanan untuk masyarakat di puskesmas dan rumah sakit Kota Surabaya.</li><li>• Point pendukung dalam penelitian terdahulu pertama persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dimana sama-sama melakukan penelitian yang terkait dengan penerapan elektronik government</li></ul>

				dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan terdapat jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya terdapat pada
2	Yohanes Payong, 2019	Kesiapan Impementasi E-Government Menuju Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Kupang.	Kuantitatif dan Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menjelaskan dari sekian banyaknya aplikasi bersifat offline dan online yang digunakan dalam mengakses data dan informasi yang masih kurang di maafatkan oleh masyarakat di Kota Kupang. Dengan alasan tersebut implementasi e-government di Kota Kupang perlu mengevaluasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>• Point pendukung dalam penelitian ini memiliki persamaan yang dimana implementasi kesiapan e-government dalam perubahan inovasi sistem daerah yang ada di kota kupang dengan persiapan melaksanakan e-government. Point perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan deskriptif.</li> </ul>
3	Muhlis Zainuddin, 2019	Efektivitas Penerapan E-Government di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.	Kuantitatif dan Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menejelaskan pentingnya menerpakan e-government dalam pelayanan di pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel sebab kabupaten Mamuju</li> </ul>

				<p>beum efektif karna sumber daya manusia (SDM) yang masing kurang dalam bidang Information Technology (IT) yang menjadi hambatan dalam terlaksanaanya penerapan e-government di kabupaten Mamuju. Penelitian ini menjelaskan pentingnya menerpakan e-government dalam pelayanan di pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel sebab kabupaten Mamuju beum efektif karna sumber daya manusia (SDM) yang masing kurang dalam bidang Information Technology (IT) yang menjadi hambatan dalam terlaksanaanya penerapan e-government di kabupaten Mamuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Point pendukung dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu dalam penerapan e-government dilihat dari efektivitas dari pelaksanaan dalam pelayanan pubik di kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, jenis metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif dan deskriptif. Dilihat dari perbedaannya terdapat point yang ingin diteliti dari efektivitas penerapan e-government itu sendiri.</li> </ul>
4	Haura Atthahara, 2018	Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-	Deskriptif dan kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menjelaskan pemanfaatan teknologi</li> </ul>

		<p>Government : Study kasus Apikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta.</p>		<p>informasi dan komunikasi berdampak sangat baik pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet atau e-government, lahirnya aplikasi Ogan Lopian di kabupaten Purwakarta membantu proses pelayanan bagi masyarakat di dalam bidang kesehatan, keamanan, laporan pengaduan masyarakat dan lowongan pekerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Point pendukung dalam penelitian terdahulu yang ke empat ini terdapat persamaannya yaitu menciptakan inovasi pelayanan publik berbasis e-government dengan membuat sebuah aplikasi untuk masyarakat yang akan membantu peneliti dalam sejauh mana penerapan e-government dan metode yang digunakan yaitu deskriptif dan kualitatif. Point perbedaan dari penelitian ini terletak dari pengembangan sebuah aplikasi yang berbeda untuk masyarakat dalam pelayanan publik itu sendiri.</li> </ul>
5	Nur Hidyati, 2016	<p>E-Government Dalam Pelayanan Publik (Study Kasus tentang Faktor-faktor Penghambat Inovasi layanan E-Samsat Jatim di Kabupaten</p>	<p>Deskriptif dan kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menjelaskan tujuan layanan e-Samsat Jatim, yaitu memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada Wajib Pajak, akan tetapi hasil</li> </ul>

		Gresik).		<p>penelitian ini menemukan permasalahan berupa faktor-faktor keberhasilan layanan e-Samsat Jatim.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Point pendukung dalam penelitian terdahulu ke lima ini terdapat persamaan yaitu penggunaan e-government dalam pelayanan publik dengan inovasi layanan E-Samsat. Point perbedaan dari penelitian ini dilihat dari study kasus faktor-faktor penghambat inovasi layanan E-Samsat dengan pemanfaatan e-government dan beberapa point lainnya yang ingin diteliti.</li></ul>
--	--	----------	--	---



## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Konsep Implementasi**

Membicarakan tentang implementasi tidak lepas dari sebuah kebijakan publik itu sendiri, yang di mana implementasi kebijakan dapat menunjukkan sebuah aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintah maupun organisasi swasta dalam menentukan kebijakan. Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Selepas dari situ, kebijakan publik menunjukkan suatu implementasi untuk berjalannya sebuah tujuan yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2005:101).

Dalam pelaksanaan atau implementasi memiliki hambatan-hambatan yang di mana sasaran dan tujuan tidak akan berjalan dengan baik yang di pengaruhi oleh beberapa factor dalam pengimplementasi sebuah kebijakan atau program tersebut faktor-faktor tersebut bisa berupa sumber daya yang kurang, dukungan organisasi dan komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam menjalankan kebijakan publik.

Perkembangan implementasi kebijakan dalam menentukan keberhasilan sebuah program atau sasaran untuk mencapai tujuan bersama, implementasi memiliki banyak model-model implementasi untuk menganalisis suatu permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah demi terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan publik, perlunya sebuah model kebijakan atau konsep implementasi kebijakan. Sehingga terdapat banyak model implementasi yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan yaitu model implementasi oleh George Edwards III dalam Widodo (2011:96) terdapat empat factor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan berpandangan bahwa implementasi kebijakan yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan public menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai dengan yang diharapkan.

b. Sumber daya

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksudkan berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor bersikap baik maka kebijakan tersebut berjalan dengan baik dengan tujuan yang diinginkan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### d. Struktur Birokrasi

Dilihat dari struktur birokrasi implementasi kebijakan menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi”. Dalam struktur birokrasi memiliki aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Aspek dari struktur birokrasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melembahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan dalam Edward III memiliki empat factor keberhasilan sebuah kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selain itu, terdapat banyak model-model implementasi kebijakan yang menentukan keberhasilan kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Model Van meter dan Van Horn

Model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Tachjan, 2006:39-40) yang disebut sebagai A Model of the Policy Implementasi Process. Model ini menjelaskan

bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan.
- b. Sumber daya.
- c. Karakteristik organisasi pelaksana.
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- e. Sikap para pelaksana.
- f. Lingkungan social, ekonomi, dan politik.

## 2. Model Merilee S. Grindle

Model yang di kembangkan oleh Merilee S. Grindle (dalam Tachjan, 2006:55-56), kerangka pemikirannya berdasarkan jawaban atas dua pertanyaan pokok, khususnya di Negara berkembang, bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut, yaitu: Content dan Context.

- Content of Policy, mencakup:
  - a. Interest affected
  - b. Type of benefits
  - c. Extent of change envisioned
  - d. Site of decision making

- e. Program implementor
  - f. Resources committed
  - Context of implementation, mencakup:
    - a. Power, interest, and strategies of actor involves
    - b. Institution and regime characteristics
    - c. Compliance and responsiveness
3. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang disebut *A Frame Work for Implementations Analysis* (dalam Tachjan, 2006:57-60), menurut kerangka pemikiran ini, variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada kesekuruhan proses implementasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, sebagai berikut:

- a. Tractability of the problem.
- b. Ability of policy decision to structure implementation.
- c. Nonstatory variabel affecting implementation.

Maksud dari ketiga kategori variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap/dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.

3. Pengaruh langsung berbagai variabel yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

#### 4. Model Hoogewerf (1978)

Model yang dikemukakan oleh Hoogewerf (dalam Tachjan, 2006:42-43), menurut Hoogewerf sebab musabab yang mungkin menjadi dasar dari kegagalan implementasi kebijakan, sangat berbeda-beda satu sama lain. Sebab-musabab ini ada sangkut-pautnya berturut-turut dengan isi (content) dari kebijakan yang harus diimplementasi, tingkat informasi dari actor-actor yang terlibat pada implementasi, banyaknya dukungan bagi kebijakan yang harus diimplementasikan dan akhirnya pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi, perbandingan kekuasaan dan seterusnya).

#### 5. Model Rippley dan Franklin

Menurut Rippley dan Franklin (dalam Subarsono, 2005:99) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga factor, yaitu:

1. Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.

3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program.

## 2.2.2. Konsep Elektronik Government (E-Government)

### a. Pengertian E-Government

Perkembangan *E-Government* memberikan perubahan inovasi pelayanan yang baru kepada masyarakat untuk menciptakan proses pelayanan publik efektif dan efisien, agar paradigma kualitas pelayanan publik berjalan secara transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan pelayanan publik memanfaatkan *E-Government* berupa teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu sistem penyelenggaraan pemerintah untuk berintraksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien demi terwujudnya pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik sangat dibutuhkan demi terwujudnya pemerintah yang baik. Menurut *The World Bank Group* (dalam Falih Suaedi & Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* adalah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Adanya aturan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan *e-government* disetiap daerah dalam melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat. Hadirnya sebuah peraturan atau perundangan yaitu Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* menjadikan bahwa *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* penataan manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Di dalam penerapan *e-government* perlunya sumber daya manusia (SDA) karena salah satu factor utama yang turut menentukan pengembangan atau pengelola maupun penggunaan *e-government* menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan *e-government* itu sendiri, dengan memiliki kualitas sumber daya yang produktif untuk melaksanakan sebuah pelayanan yang baik kepada masyarakat agar terciptanya pemerintahan yang baik (*Good governance*). Oleh karena itu, pemerintah dalam mendukung penerapan *e-government* harus meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang agar tercapainya pelayanan publik efektif dan efisien. Sehingga perlunya pemerintah memberikan informasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar

dengan mudah mendapatkan informasi publik secara transparansi dan akuntabilitas.

Sehingga kerangka arsitektur *e-government* untuk menjamin pelayanan public yang efektif dan efisien, dengan keterpaduaan sistem pengelolaan dan pengelohan dokumen dan informasi elektronik dalam pelayanan public yang transparansi, dapat dilihat dari empat struktur tersebut:

1. Akses, yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.
2. Portal pelayanan publik, yaitu situs-situs penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengelohan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, yaitu organisasi pendukung (*back-office*) yang mengelola, menyediakan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar, yaitu semua prasarana baik berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. Baik antar *back-office* portal pelayanan publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya.

#### **b. Manfaat E-Government**

Dilihat dari perkembangan *e-government* memiliki banyak manfaat dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Menurut Misuraca (2007:57-57) sebagaimana dari skripsi Ainun Azwaria tahun 2013, yaitu dimensi ekonomi, sosial dan pemerintahan.

1. Dimensi ekonomi

Manfaat *e-government* bagi kegiatan ekonomi yaitu mengurangi biaya transaksi untuk kapasitas yang lebih baik dengan target pelayanan, peningkatan cakupan dan kualitas penyampaian pelayanan, meningkatkan kapasitas respon dalam mengatasi permasalahan isu-isu kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

2. Dimensi sosial

Dalam kegiatan sosial, manfaat *e-government* begitu banyak mulai dari penciptaan lapangan kerja di sektor ketiga, peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan, penargetan yang lebih baik atas pelayanan pemerintah, peningkatan kapasitas dalam penyediaan keselamatan dan keamanan. Dan juga dalam pelayanan keuangan di pemerintahan.

3. Dimensi pemerintah

Dalam hal pemerintahan, manfaat *e-government* itu sendiri memiliki banyak manfaat dalam dapat meningkatkan pelayanan publik untuk tercapainya *good governance* yang berupa kegiatan

dalam peningkatan keterbukaan informasi, transparansi, akuntabel atau demokratis dibandingkan dengan pemerintahan yang konvensional. Dengan kata lain, manfaat bagi pemerintah *e-government* juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung sistem demokrasi yang ada dalam meningkatkan pelayanan publik dari pemerintah.

**c. Intruksi Presiden no. 3 Tahun 2003**

Inpres No. 3 Tahun 2003 merupakan intruksi presiden yang dikeluarkan pada tahun 2003 di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Inpres ini dikeluarkan dengan alasan untuk meningkatkan pelayanan publik dari pemerintah untuk masyarakat agar mencapai pelayanan yang efektif dan efisien dalam mencapai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* di Indonesia. Inpres No. 3 Tahun 2003, memiliki beberapa poin penting dalam penerapan *e-government*, yaitu:

1) Tujuan pengembangan E-Government

Pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk penyeenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dengan pengembangan *E-Government* dalam menata sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu:

- a) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
- b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah bagi masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan pengembangan *E-Government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:

- a) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas dan juga dapat terjangkau di seluruh wilayah di Indonesia saat ini.
- b) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha agar meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog politik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan

layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

## 2) Pemerintah yang diharapkan

Pemerintahan menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Dalam hal ini, Pemerintah harus memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakatnya yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu:

- a) Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.
- b) Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar oleh pemerintah dengan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan negara.

## 3) Strategi pengembangan E-Government

Percapaian tujuan strategis E-government perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu:

- a) Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat.
- b) Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- c) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal

- d) Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- e) Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
- f) Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

#### 4) Pengembangan E-Government

Dilihat dari sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *E-government* dapat dilaksanakan 4 (empat) tingkatan, yaitu:

##### a) Tingkat 1 - persiapan :

- Pembuatan situs informasi di setiap lembaga.
- Penyiapan SDM (sumber daya manusia)
- Penyiapan sarana akses yang mudah seperti sarana *multipurpose community center, warnet, SME-center*.
- Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.

##### b) Tingkat 2 – pematangan :

- Pembuatan situs informasi publik intraktif.
- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

c) Tingkat 3 – pemantapan :

- Pembuatan situs transaksi pelayanan publik.
- Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

d) Tingkat 4 – pemanfaatan :

- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.
- Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat – 4.
- Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan mengalami kegagalan yang tidak hanya menimbulkan pemborosan namun juga menghilangkan kepercayaan masyarakat.

### **2.2.3. Sistem Informasi jaringan Peternakan (Sijinak)**

Sistem Informasi Jaringan Peternakan atau disebut Sijinak, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mengelola dan memantau pertumbuhan populasi ternak dengan memanfaatkan sistem Sijinak. Menurut Surjarwo, Inovator dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa menjelaskan bahwa sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) untuk memperpendek rantai birokrasi ternak keluar daerah.

Sijinak adalah sistem informasi jaringan peternakan Kabupaten Sumbawa yang terpadu. Sistem ini berbasis web untuk memfasilitasi kearifan lokal masyarakat Sumbawa dalam budidaya ternak (sapi, kerbau dan kuda) dengan mengumpulkan data ternak dan pemilik ternak melalui registrasi ternak secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, dapat diakses, laporan sesuai kebutuhan. Dalam sistem Sijinak dapat menghubungkan data populasi ternak dengan berbagai bidang penanganan pengelolaan ternak secara otomatis. Sistem Sijinak ini mendukung dalam pengolahan data ternak dan pemilik ternak yang mengatur tentang berbagai kegiatan yaitu e-Registrasi Ternak, e-Vaksinasi Ternak, e-Perizinan Pengeluaran Ternak, e-Money pelaku Usaha Ternak dan e-Bantuan Ternak.

Perkembangan *e-government* disetiap daerah yang ada di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pelayanan publik agar terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien. Pemerintah kabupaten Sumbawa mulai menerapkan pelayanan *e-government*

untuk mempermudah pelayanan publik, dengan adanya peraturan atau undang-undang yaitu Peraturan Bupati Sumbawa Nomor. 91 Tahun 2018 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi di daerah. Adanya *Smart City* Sumbawa yang dimana mampu mengintegrasikan tiga kepentingan yaitu masyarakat (peternak), pemerintah dan dunia usaha.

Oleh karena itu, sistem Sijinak akan mampu mengelola teknologi pakan ternak bagi masyarakat peternak agar meningkatkan kualitas ternak yang lebih baik, dan juga bagi pemerintah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dunia usaha dalam kualitas jual ternak yang lebih baik.

Adapun sistem Sijinak ini mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (peternak) dengan pembuatan kartu ternak secara elektronik, dengan mengakses melalui sistem Sijinak. Sehingga pemanfaatan sistem Sijinak ini akan mampu berperan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Sumbawa Besar.

#### **2.2.4. Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sijinak**

Aplikasi ini merupakan aplikasi pengumpulan data berbasis website yang dapat di akses secara online melalui laman website

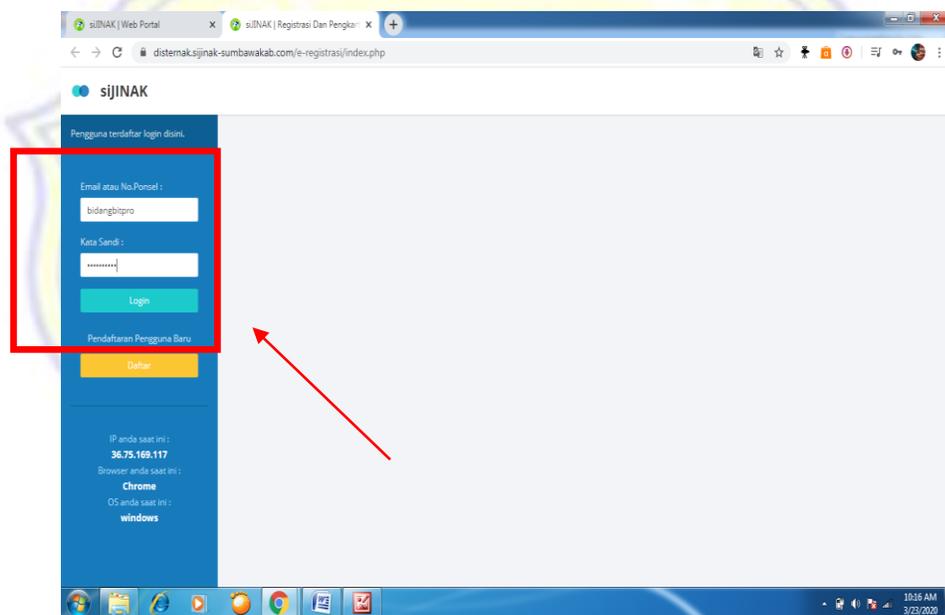
<http://sijinakhub.sumbawakab.go.id>. dengan menggunakan browser pada computer atau perangkat mobile lain yang nantinya dapat terhubung ke internet.



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa 2021

Gambar diatas adalah tampilan awal ketika membuka aplikasi ini. Pada halaman tersebut terdapat beberapa pilihan menu yaitu : E- Registrasi dan Pengkartuan Ternak, E-Izin Pengeluaran Ternak, E-Pelayanan Kesehatan Hewan, E-RPH R, E- Pasar Ternak, E Bantuan Ternak, E-Lar E, E-UPT Prokeswan.

Dalam operasionalnya tentang cara operasional E-Registrasi dan Pengkartuan Ternak seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Untuk login masukan user id dan password seperti gambar di atas. Jika login berhasil maka akan diarahkan seperti gambar dibawah ini, dan pilih kabupaten serta kecamatan.

### Pengaturan Akses Awal

**Pengaturan Akses Awal**

Pilih Lokasi Kabupaten :

Sumbawa

Pilih Lokasi Kecamatan :

-- Daftar Kecamatan --

✓ Simpan    ✕ Batal

Jika proses login tersebut berhasil maka langsung diarahkan pada halaman utama atau dashboard sijnak.

The screenshot shows the sijnak dashboard interface. The browser address bar displays "distemak.sijnak-sumbawakab.com/e-registrasi/admin.php". The dashboard header includes the sijnak logo and the text "Selamat Datang di Sistem Informasi sijnak". A notification banner at the top states "Anda memiliki pemberitahuan" with a "Tampilkan semua pemberitahuan" link. The "Informasi User" panel on the right displays the following details:

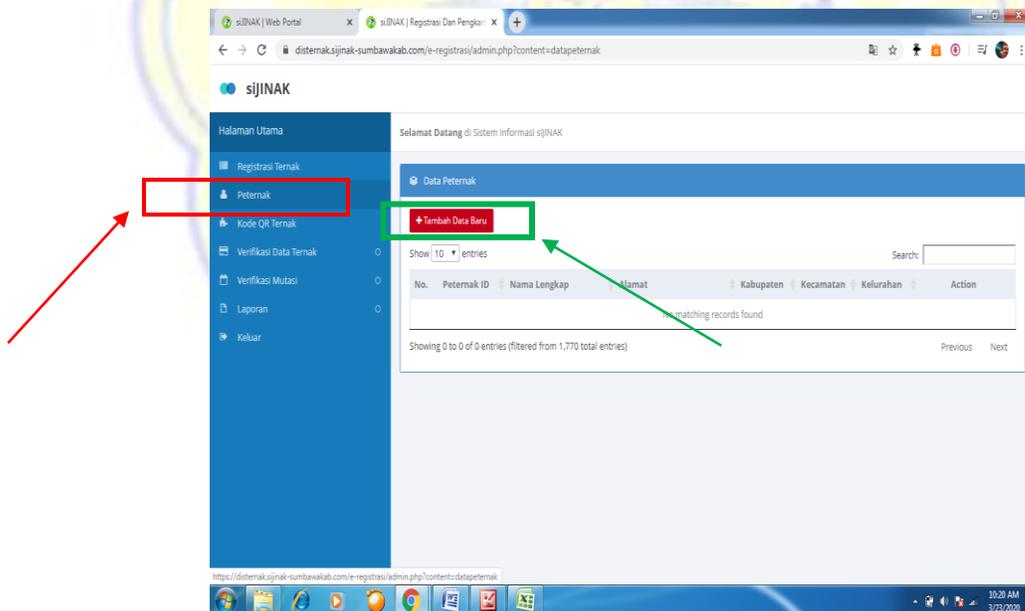
Informasi User	
Level Akses :	< Kecamatan >
Lokasi Akses Kecamatan :	< Orong Telu >
Nama User Akses :	< Darimi >

The left sidebar menu includes: Halaman Utama, Registrasi Ternak, Peternak, Kode QR Ternak, Verifikasi Data Ternak, Verifikasi Mutasi, Laporan, and Keluar. The system clock at the bottom right shows 10:20 AM on 3/23/2020.

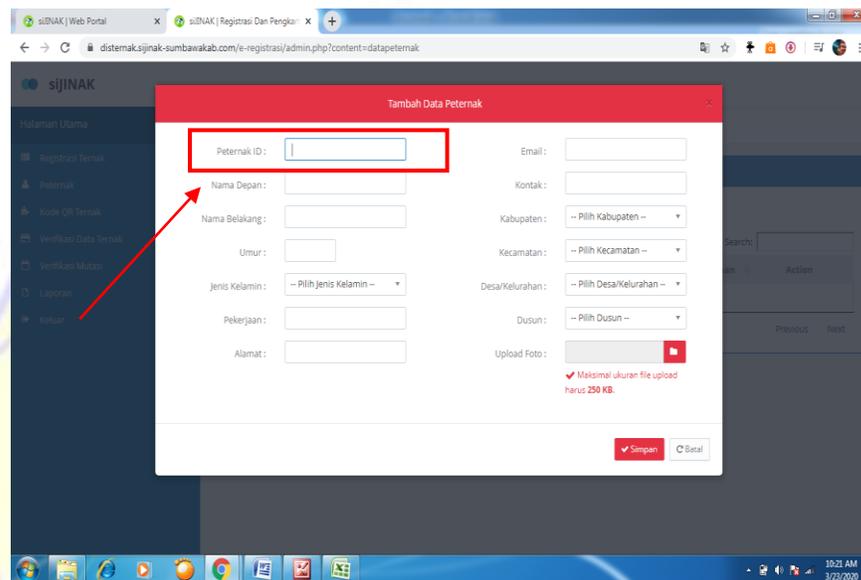
Pada halaman utama diatas terlihat ada beberapa menu pilihan untuk melakukan registrasi ternak. Untuk melakukan registrasi ternak secara online, pada prinsipnya sama dengan registrasi yang dilakukan secara manual. Berikut langkah – langkah untuk melakukan registrasi ternak secara online pada aplikasi siJinak.

### 1. Pendaftaran Peternak.

Langkah pertama untuk melakukan registrasi ternak yaitu dengan melakukan pendaftaran peternak dengan cara klik menu peternak. Maka akan terlihat seperti gambar dibawah ini, selanjutnya klik menu tambah baru.



Menu tambah baru adalah menu untuk mendaftarkan peternak pada aplikasi E-Registrasi yang berisi kolom biodata peternak yang lengkap serta berisi nomor KTP peternak sehingga kecil kemungkinan terjadi double data peternak. Berikut gambar menu tambah data peternak.

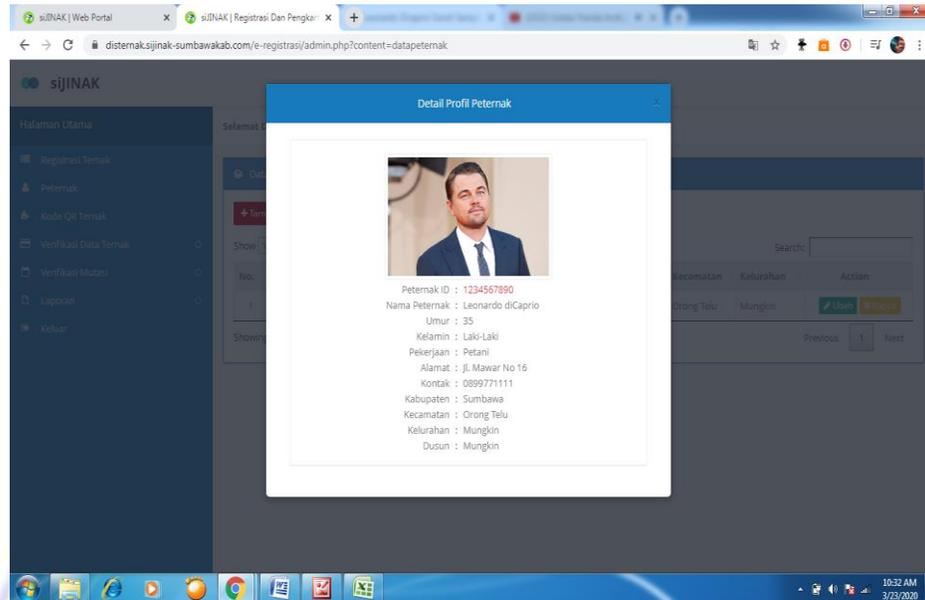


The screenshot shows a web browser window with the URL [distemak.sijnak-sumbawakab.com/e-registrasi/admin.php?content-datapeternak](http://distemak.sijnak-sumbawakab.com/e-registrasi/admin.php?content-datapeternak). The page title is "sIJINAK" and the form title is "Tambah Data Peternak". The form contains the following fields:

- Peternak ID:
- Nama Depan:
- Nama Belakang:
- Umur:
- Jenis Kelamin:
- Pekerjaan:
- Alamat:
- Email:
- Kontak:
- Kabupaten:
- Kecamatan:
- Desa/Kelurahan:
- Dusun:
- Upload Foto:

At the bottom right of the form, there is a note: "Maksimal ukuran file upload harus 250 KB." and two buttons: "Simpan" and "Batal".

Input setiap kolom biodata peternak dan pastikan biodata telah terisi dengan benar lalu klik tombol simpan. Untuk kolom **peternak ID** diisi dengan nomor KTP peternak. Perlu diperhatikan bahwa nomor KTP tidak boleh salah, karena jika sudah tersimpan nomor tersebut tidak akan bisa diubah kembali dan kita harus menghapus data tersebut lalu dibuat ulang lagi.



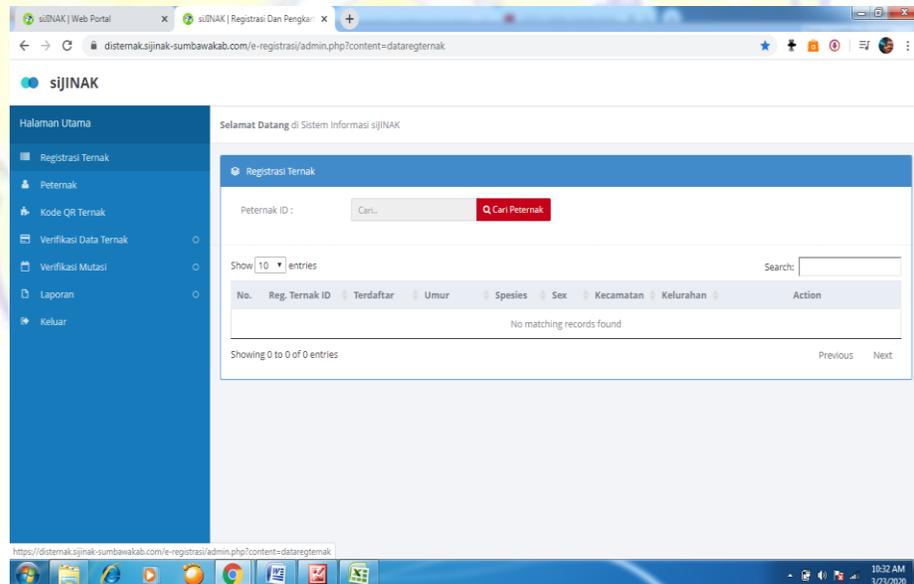
Cek kembali data-data peternak yang telah diinput, jika masih ada kesalahan, dikoreksi dengan cara klik ubah. Jikan kesalahan terdapat pada Peternak ID atau nomor KTP maka klik hapus dan ulang proses pendaftaran peternak.

Selamat Datang di Sistem Informasi sIJINAK

Data Peternak							
<a href="#" style="background-color: red; color: white; padding: 5px;">+ Tambah Data Baru</a>							
Show <input type="text" value="10"/> entries		Search: <input type="text"/>					
No.	Peternak ID	Nama Lengkap	Alamat	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	Action
1	123456789	leonardo dicaprio	dfsd	Sumbawa	Orong Telu	Mungkin	<a href="#" style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px;">Ubah</a> <a href="#" style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px; margin-left: 5px;">Hapus</a>
Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 2,131 total entries)						Previous <input type="button" value="1"/> Next	

## 2. Registrasi ternak

Registrasi adalah kegiatan pendaftaran pemilikan ternak dengan pembacaan dan pencatatan sidik ternak dalam buku induk dan kartu ternak yang bertujuan untuk mendapatkan data populasi dan struktur populasi. Dalam hal ini registrasi ternak tidak dilakukan dalam buku induk tetapi melalui aplikasi e-registrasi. Melalui e-registrasi diharapkan kegiatan registrasi dapat berjalan dengan efektif, efisien serta mendapatkan data baku populasi ternak yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penentu arah kebijakan peternakan pada Kabupaten Sumbawa.



Untuk melakukan registrasi ternak, klik pilihan Registrasi pada menu utama, selanjutnya cari peternak yang akan diregistrasi ternaknya

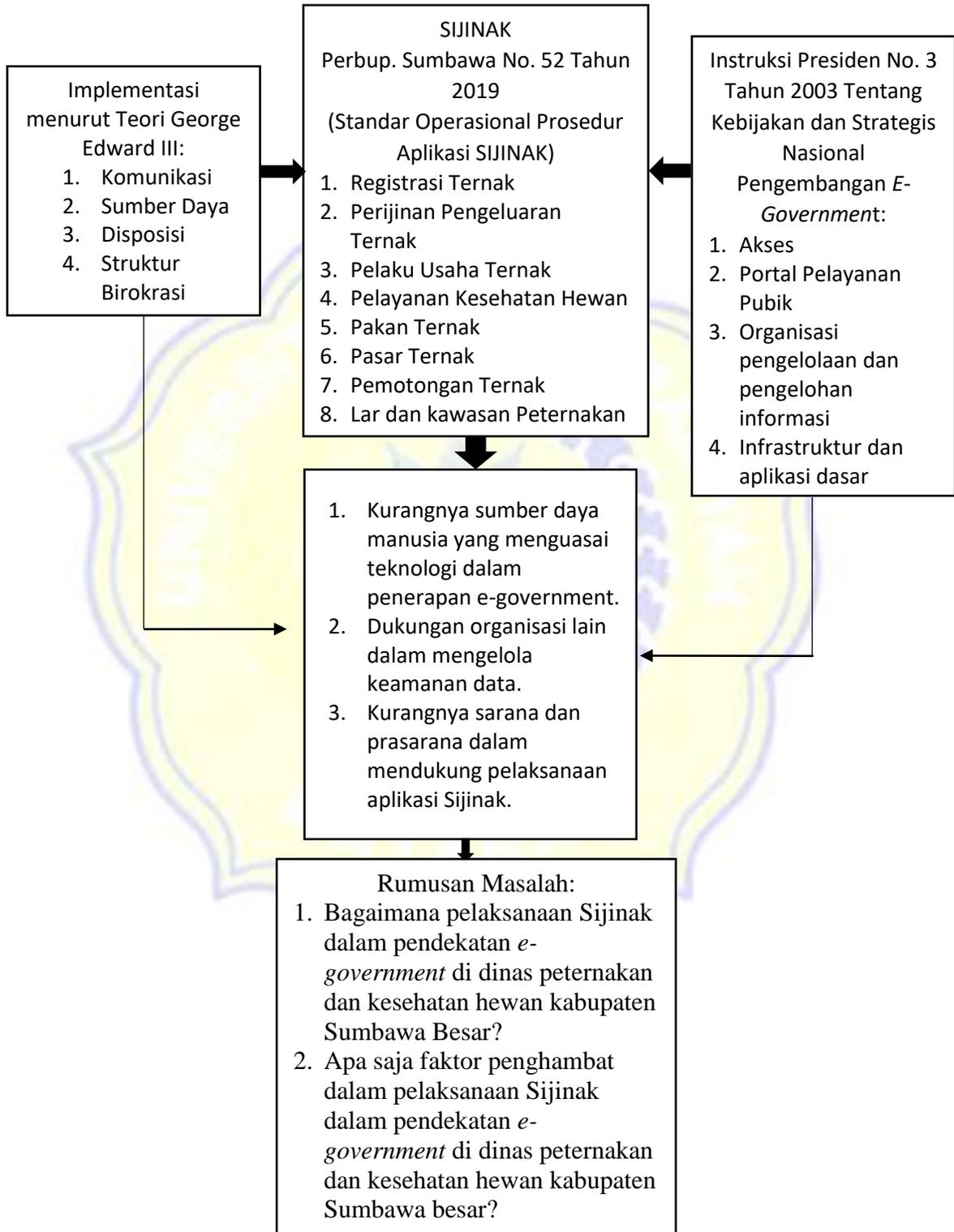
dengan cara klik tombol merah cari peternak maka akan keluar daftar peternak yang telah didaftarkan seperti yg terlihat pada gambar dibawah ini.

Data Peternak						
No.	Peternak ID	Nama Lengkap	Alamat	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan
1	520405608820001	amaq idi	Juranalas	Sumbawa	Alas	Juranalas
2	5204054602620001	Siti Aminah	Juranalas	Sumbawa	Alas	Juranalas
3	5204054407970001	Rohaini Rohaini	Juranalas	Sumbawa	Alas	Juranalas
4	520405420180002	Siti Aminah	Juranalas	Sumbawa	Alas	Juranalas
5	5204054201800002	Siti Aminah	Juranalas	Sumbawa	Alas	Juranalas
6	5204054107800061	Sumnah sumnah	Juranalas	Sumbawa	Alas	Juranalas
7	5204054076300075	ramli kardi	Juranalas	Sumbawa	Alas	Juranalas
8	5204052306770001	Amaq Safwan	Juranalas	Sumbawa	Alas	Juranalas
9	5204052110730001	Harin Hasan	Juranalas	Sumbawa	Alas	Juranalas
10	5204051503900002	Haerul Anwar	Juranalas	Sumbawa	Alas	Juranalas

Showing 1 to 10 of 66 entries (filtered from 2,131 total entries)      Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

Selanjutnya cari nama peternak yang akan di registrasi ternaknya, klik dan isi identitas ternak ternak sesuai dengan ternaknya, dari data tersebut dapat dilihat semua data ternak yang ada di Kabupaten Sumbawa Besar tersimpan dalam Sistem Informasi Jaringan Peternakan agar terjamin keamanan data ternak dan pemilik ternak.

### 2.3. Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Maka dari itu, penelitian kualitatif akan membantu peneliti untuk memecahkan permasalahan yang ingin diselesaikan untuk mendapatkan hasil yang telah di paparkan di latar belakang tersebut dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian saya dalam pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

#### **3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di lakukan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa jalan Dr. Wahiddin No. 25 Sumbawa besar. Tujuan mengambil lokasi ini karena pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) di laksanakan oleh dinas tersebut untuk mengelola perkembangan

peternakan yang ada di Kabupaten Sumbawa Besar dan sejauh mana sistem Sijinak dalam penggunaannya. Oleh karena itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Besar sebagai lokasi penelitian bagi peneliti untuk mendapatkan data-data dokumen dan informasi yang terkait dalam permasalahan dari pelaksanaan sistem Sijinak dan sistem Sijinak ini merupakan sistem yang mengatur tentang permasalahan peternakan yang di Kabupaten Sumbawa sehingga untuk melihat keberhasilan dari sistem Sijinak.

### **3.3 Pemilihan informan / Narasumber**

Pemilihan informan atau narasumber dalam penelitian ini, peneliti harus memilih orang yang sangat tahu tentang pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) untuk mengetahui pelaksanaan sistem tersebut yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar.

Berdasarkan penjelasan di atas informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Satria Utama, S.Pt, M.Si sebagai Kasubbag Umum dan Perencanaan dan Pelaporan.
2. bapak Fery Anggriawan, S.pt.
3. bapak Abdul Munir.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni :

1. Data Primer : data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan. Data primer dalam bentuk data Peraturan Bupati tentang SOP SIJINAK dan dokumen lainnya yang diperoleh di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar.
2. Data Sekunder : yaitu pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data yang diperoleh berupa dokumen, rekaman wawancara dan dokumentasi berupa foto-foto wawancara. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara observasi langsung di kantor dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar.

### **3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Menurut Lofland dalam Moleong (2011:157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data

tertulis, foto, dan lainnya. Jadi, dalam penelitian ini saya akan menggunakan teknik dan alat pengumpulan data dengan tiga teknik yaitu, sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Cartwright dalam Sugiyono (2014:131), observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah mengamati secara langsung.

Dengan menggunakan teknik observasi saya akan turun ke lapangan dengan melihat dan mengamati langsung para petugas dinas peternakan dan kesehatan hewan dalam mendata “ternak” dan “pemlik ternak” yang nantinya pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak), mengamati cara kerja dari Sijinak dalam mendata ternak dengan cara yang baru.

b. Wawancara

Menurut Stewart & Cash dalam Sugiyono (2012: 118), wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.

Dalam penelitian ini selain teknik observasi akan menggunakan teknik wawancara, yang dimana akan menyiapkan pertanyaan terkait permasalahan yang ingin di teliti dari sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) dalam pendataan baru di dinas peternakan dan kesehatan hewan. Pemilihan responden dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi

terkait dengan pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan yang di dinas peternakan kabupaten Sumbawa Besar. Sehingga hasil yang diharapkan dari wawancara dengan para informan dapat menjadi sebuah data yang akurat yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 143), dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini data dokumentasi menjadi bahas pendukung untuk memperkuat penelitian hasil peneliti saya terkait pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan, diantaranya dokumen berupa peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh guna

menghasilkan data yang akurat dari obyek yang diteliti kemudian di paparkan sesuai dengan kondisi dan waktu. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Menurut Miles and huberman dalam Sugiyono (2015:91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengambil data pokok, mengorganisir data kasar yang diperoleh dari lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus di jadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam mereduksi data dapat didiskusikan pada teman atau orang lain yang dianggap ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang dimiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Mereduksi data dapat dilakukan dengan cara hasil catatan di lapangan yang banyak dan belum bermakna. Catatan lapangan berupa huruf besar dan kecil, angka dan simbol-simbol yang masih semrawut, yang tidak dapat dipahami. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang tidak penting yang diilustrasikan dalam bentuk simbol-simbol dan lain-lain dibuang, karena dianggap tidak penting.

b. Display data ( penyajian data )

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data (Penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:91) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matrik atau konfigurasi yang mudah dipahami. Konfigurasi yang demikian ini akan

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, maka mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut disarankan, selain teks naratif dalam penyajian data bisa menggunakan grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan Chart.

#### c. Menarik Kesimpulan

Setelah pengumpulan data, Peneliti mulai mencari makna dari data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu kedalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan, dari data yang terkumpul kemudian dikategorikan sesuai dengan perincian masalahnya dan di bandingkan antara satu dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan.

### **3.7 Teknik Validitas Data**

Validitas data merupakan standar keabsahan dari data yang diperoleh. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Moleong (2011: 324) terdapat empat kriteria keabsahan data yaitu:

#### 1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Pada dasarnya derajat kepercayaan (kredibilitas) menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan antara lain:

## 2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin dalam (Moleong, 2011: 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, teori. Dalam penelitian ini, peneliti ini melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Besar yang mengetahui tentang pelaksanaan system jaringan informasi peternakan (Sijianak). Selain itu, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi.

## 3. Kecukupan Referensial

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan-bahan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

## 4. Keteralihan (Transferability)

Pengujian transferability atau keteralihan data berkenaan dengan hingga mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk melakukan keteralihan, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan system jaringan informasi peternakan (Sijinak).

#### 5. Kebergantungan (Dependability)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkuantitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing.

#### 6. Kepastian (Confirmability)

Menguji kepastian data (Confirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.